



MINIMALKAN PELANGGARAN Yogya Jadi Percontohan Pengendalian Pemerintah

YOGYA (KR) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY bekerja sama dengan World Bank membidik Kota Yogyakarta sebagai percontohan di Provinsi DIY dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Instansi pertama kali yang menjadi *pilot project* SPIP ialah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Kepala Perwakilan BPKP DIY, Condro Imantoro mengungkapkan, proses SPIP sebenarnya telah digulirkan sejak beberapa tahun lalu. Pelaksanaan di Kota Yogyakarta dinilai cukup bagus sehingga kini dijadikan sebagai percontohan bagi daerah lain di DIY. "Kami selaku instansi pembina dan kerja sama dengan World Bank untuk menjadikan penerapan SPIP di Kota Yogyakarta sebagai contoh. Harapannya, bisa menjadi *best practise* bagi daerah lain," ungkapnya di sela peluncuran *pilot project* SPIP di kompleks Balaikota Yogyakarta, Selasa (26/5).

Proses percontohan ini akan berlangsung selama satu tahun. Satuan tugas (satgas) SPIP yang telah terbentuk di Kota Yogyakarta menjalin koordinasi dengan satgas BPKP DIY selama menjalankan SPIP. "Kami nanti hanya melakukan bimbingan dan memfasilitasi saja. Meski targetnya satu tahun, namun dalam jangka waktu 2 bulan sudah bisa berjalan dengan sinergis," paparnya.

Wakil Walikota Yogyakarta, Imam Priyono menambahkan, instansi utama yang mengawali SPIP secara intensif ialah Dinas Perizinan. Dipilihnya dinas tersebut lantaran berkaitan langsung dengan pelayanan masya-

rakat, terutama pelayanan perizinan yang mendongkrak tingkat ekonomi.

Imam menargetkan, dalam jangka waktu 2 tahun, seluruh SKPD di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dapat menjalankan SPIP dengan optimal. Sehingga, satgas SPIP di Dinas Perizinan sebagai *pilot project* akan di pantau dan di evaluasi secara bertahap. "Nanti semua kegiatan bisa sinergis. Mulai perencanaan hingga pelaporan. Apa yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Perizinan, maka tidak akan bisa dikeluarkan oleh instansi lain. Begitu sebaliknya," ungkapnya.

Oleh karena itu, dengan penerapan sistem pengendalian yang efektif maka akan meminimalisir terjadinya berbagai pelanggaran dalam pemerintahan. Baik pada saat perencanaan kegiatan maupun dalam hal penggunaan anggaran. Jumlah satgas SPIP yang dimiliki Pemkot saat ini mencapai 55 orang. "SPIP tidak akan efektif jika tidak didukung dengan *human resource* yang baik," imbuh Imam.

Imam juga mengungkapkan, dengan bimbingan dari BPKP DIY, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 di Kota Yogyakarta meraih prestasi pertama dari seluruh kota di Indonesia. Selain itu, hasil penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) terhadap pelaporan keuangan tahun 2011 juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Usai launching *pilot project* SPIP, seluruh satgas langsung mengikuti Focus Group Discussion selama 4 hari mendatang serta pendidikan dan pelatihan. (M-6)-g

Kan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005